



MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
 DPRD KOTA YOGYAKARTA

BADAN PEMBUAT PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)

Gerak Cepat Tuntaskan Kinerja Legislasi 2024

YOGYA (KR) - Sejak memasuki triwulan pertama tahun ini, Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta sudah tancap gas menjalankan fungsi legislasi. Tidak kurang dari enam panitia khusus (pansus) sudah dibentuk guna membahas Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) maupun persoalan spesifik. Gerak cepat dalam menuntaskan kinerja legislasi juga turut didukung oleh tim eksekutif dalam kesiapan menyiapkan materi.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo, menyebut sebagai alat kelengkapan dewan yang memiliki tugas utama dalam mendorong kinerja di bidang legislasi, maka pihaknya tidak bisa berdiam diri. "Sejak awal tahun sudah banyak pembahasan. Waktu itu bahkan beririsan dengan tahapan Pemilu 2024 sehingga menyita waktu dan energi yang luar biasa. Alhamdulillah, semua bisa berjalan dengan baik," katanya. Tidak mengherankan, selama proses pemilu hampir semua anggota dewan harus berkecimpung di masyarakat. Banyak agenda politik yang harus dituntaskan oleh legislatif, baik sebagai peserta maupun



KR-Ardhi Wahdan
Emanuel Ardi Prasetyo

wakil dari partai. Kondisi tersebut berimbas pada agenda ke depan yang harus diselesaikan. Tetapi di sisi lain, kinerja legislasi juga tidak bisa diperlambat seiring kebutuhan produk hukum sebagai pedoman jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, Bapemperda hampir tidak berhenti berkoordinasi dengan eksekutif kaitannya dengan kesiapan naskah raperda yang mendesak untuk dibahas. Widodo mengatakan, dirinya bahkan meminta setiap materi yang sudah siap agar langsung disampaikan ke dewan. Hal ini agar dapat digendakan pengambilan keputusan melalui sidang paripurna. "Teman-teman di dewan sudah memegang komitmen untuk menuntaskan kinerja dengan baik. Makanya meski kemarin banyak yang sibuk pemilu tetapi agen-



KR-Ardhi Wahdan
Rapat pembahasan yang dilakukan oleh pansus DPRD Kota Yogyakarta akhir Maret lalu.

da legislasi selalu kuorum. Saat ini begitu pemilu berlalu, percepatan kinerja juga kami lakukan," imbuhnya. Total ada 14 produk hukum yang masuk dalam Propemperda tahun 2024. Masing-masing terdiri dari sembilan raperda yang diajukan oleh eksekutif, tiga raperda urusan wajib, dan dua raperda inisiatif dari kalangan dewan. Jumlah target produk hukum itu pun sama dengan tahun 2023 lalu. Sesuai ketentuan, ketika Propemperda bisa dituntaskan 100 persen maka untuk target tahun depan bisa ditambah hingga 25 persen. Dengan begitu tahun ini DPRD Kota Yogyakarta sebetulnya bisa membahas hingga 17 produk hukum. Akan tetapi

Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta tetap menargetkan 14 Propemperda lantaran mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan ialah adanya harmonisasi dengan Kementerian dan tahap awal dan berkaitan dengan naskah akademik. Sebelumnya ada tujuh raperda yang sudah disiapkan oleh internal dewan. Akan tetapi hasil dari harmonisasi, ternyata hanya dua raperda yang dinilai paling siap sedangkan lima raperda usulan dewan lainnya masih harus disempurnakan naskah akademiknya terlebih dahulu. "Pemilu 2024 kemarin juga menjadi pertimbangan kami. Karena setelah pelantikan nanti harus dibentuk alat ke-

lengkapan dulu agar tugas dewan bisa berjalan optimal. Biasanya pembentukan alat kelengkapan penuh dinamika. Sehingga kami memandang target 14 produk hukum ini sangat realistis," tandasnya. Oleh karena itu Bapemperda sangat optimis Propemperda tahun ini dapat dituntaskan 100 persen. Pihaknya juga mengupayakan kesiapan naskah akademik atas raperda yang menjadi inisiatif dewan. Dengan begitu pada tahun 2025 mendatang Propemperda bisa dimaksimalkan hingga 17 produk hukum, dan minimal empat raperda di antaranya merupakan inisiatif dari dewan. Skema pembahasan Propemperda tahun ini



KR-Ardhi Wahdan
Tri Waluko Widodo

juga sudah disiapkan. Setidaknya ada lima raperda yang tengah dibahas pada awal tahun ini. Masing-masing ialah terkait perubahan perundang-undangan Bank Jogja dari perumda menjadi perseroda sesuai amanat undang-undang. Setelah itu pencabutan perda terkait pedoman pembinaan LPMK, RT dan RW. Selanjutnya perda terkait pengelolaan air limbah domestik. Terakhir perda untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023. Dalam waktu dekat sejumlah raperda juga akan segera dilakukan pembahasan setelah disampaikan oleh tim eksekutif. Sementara Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Emanuel Ardi Prasetyo,

mengungkapkan sampai saat ini ternyata masih banyak regulasi di daerah berupa perda yang sudah tidak sesuai karena berusia cukup tua atau usang. Pihaknya sudah berkomitmen untuk melakukan penyesuaian terhadap perda yang telah usang tersebut. "Makanya ada beberapa raperda yang itu berkaitan membahas pencabutan perda. Ada juga raperda yang itu merevisi perda yang sudah ada agar bisa sesuai dengan kondisi masa kini," tandasnya. Jumlah produk hukum yang sudah usang dinilai sangat banyak bahkan bisa mencapai ratusan produk hukum. Akan tetapi seiring dengan terbatasnya Propemperda yang bisa dibahas maka penyesuaian akan dilakukan secara bertahap. Setiap tahun pencabutan dan penyesuaian perda akan selalu digendakan dengan jumlah yang proporsional. Jika pada tahun tersebut tidak ada persoalan yang mendesak maka jumlah raperda untuk pencabutan atau penyesuaian perda bisa diperbanyak. Sebaliknya, ketika banyak skala prioritas yang harus memiliki payung hukum, maka penuntasan perda usang juga tidak bisa dipaksakan untuk diperbanyak. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005